

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Imunisasi sudah terbukti sebagai upaya kesehatan yang efisien dan efektif dalam mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Beberapa penyakit tersebut, di antaranya tuberkulosis (TBC), polio, difteri, tetanus, hepatitis B, pertussis, campak, rubella, pneumonia dan meningitis (Kemenkes, 2019). Di Indonesia, setiap bayi (usia di bawah 12 bulan) wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari Hepatitis B, *Bacillus Calmettem Guerin* (BCG), difteri pertusis tetanus hepatitis-B *Haemophilus influenzae* tipe B (DPT-HB-HiB), *oral poliovirus vaccine* (OPV), dan campak/ *measles-rubella* (MR) (Kemenkes, 2018).

Penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada Tahun 2019 sudah mencapai (92,3%), namun belum mencapai standar *Universal child Immunization* (UCI) di Indonesia (100%) (Kemenkes, 2019). Hal ini dikaitkan dengan kurangnya kesadaran tentang manfaat imunisasi dan keraguan terhadap vaksin yang digunakan (Harapan *et al.*, 2019). Selain itu, penelitian tentang gerakan anti vaksin di Indonesia di peroleh menolak vaksinasi dikarenakan informasi yang di peroleh dari media informasi (68,12%) diikuti oleh kepatuhan terhadap masalah agama (46,38%) yang mana stigma tersebut berasal dari persepsi mereka sendiri (53,62%) (Dasman dan Hidayatullah, 2016).

Pada tahun 2020 pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) telah menjadi krisis kesehatan di dunia dikarenakan penyebaran yang sangat cepat dan berisiko tinggi menularkan di suatu komunitas yang padat sehingga telah menjadi suatu pandemi global (Kobayashi, 2020). Program imunisasi menjadi salah satu program kesehatan yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 (Kemenkes, 2020a). Sejak Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama pada bulan Maret 2020, cakupan imunisasi rutin dalam rangka pencegahan penyakit anak seperti campak, rubella, dan difteri semakin menurun. Tingkat cakupan imunisasi DPT3 dan MR berkurang lebih dari 35% pada bulan Mei 2020 dibandingkan periode waktu yang sama pada tahun sebelumnya (Kemenkes, 2020a).

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan pengendalian virus dan memperkuat kapasitas sistem pelayanan kesehatan di masa pandemi. Dengan dibukanya kembali layanan imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) dari PD3I (P2PKemenkes, 2020). Kementerian kesehatan mengembangkan dan mensosialisasikan serangkaian pedoman, standar operasi prosedur (SOP), dan materi komunikasi informasi edukasi (KIE) (Kemenkes, 2020b).

Pada bulan Maret 2020 Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menerbitkan SE Nomor SR.02.06/4/1332/2020 tentang Surat Edaran Pelayanan Imunisasi Pada Anak Selama Masa Pandemi COVID-19 di susul pada bulan Mei diterbitkan Juknis Pelayanan Imunisasi pada Masa Pandemi COVID-19 (Kemenkes, 2020b). Pelaksanaan imunisasi dibarengi dengan penerapan

protokol kesehatan anak diatur dalam Surat Menteri Kesehatan Nomor SR.02.01/Menkes/213/2020 (Kemenkes, 2020b).

Meskipun telah dikeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan di masa pandemi oleh pemerintah Republik Indonesia, namun masih belum mampu untuk meyakinkan orang tua pentingnya imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia. Cakupan program imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada tahun 2019 sebesar (92,3%) (Kemenkes, 2019). Namun, pada laporan data cakupan imunisasi dasar lengkap pada bulan Januari sampai April 2020 yang dibandingkan dengan 2019 pada kurun waktu yang sama menunjukkan penurunan signifikan sebesar (4,7%) (P2PKemenkes, 2020).

Survei yang dilakukan oleh kementerian kesehatan terhadap pelaksanaan imunisasi menunjukkan bahwa (lebih dari 43%) klinik dan rumah sakit swasta menjadi sumber utama untuk mendapatkan layanan imunisasi selama pandemi COVID-19 (Kemenkes, 2020a), dimana sebelumnya (90%) anak dapat memperoleh imunisasi di layanan kesehatan publik seperti puskesmas dan posyandu (Coe *et al.*, 2017). Pada survei tersebut ditemukan (76%) enggan untuk menggunakan pelayanan kesehatan dikarenakan takut dan khawatir tertular COVID-19 (Kemenkes, 2020a). Penelitian tentang kekhawatiran orang tua untuk pergi ke pusat kesehatan masyarakat karena takut anak terinfeksi COVID-19 menjadi penyebab utama penurunan cakupan imunisasi rutin pada masa pandemi COVID-19 (Hamid *et al.*, 2020; Santoli *et al.*, 2020).

Cakupan data imunisasi dasar lengkap di Provinsi Sumatera Barat juga mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2019 sebesar (76,2%) menurun pada tahun 2020 menjadi (56,2%) (Dinkes, 2021), yang mana sebelumnya di Sumatera Barat juga mengalami masalah terkait penerimaan program imunisasi tambahan *measless rubela* yang menurunkan angka cakupan imunisasi di Sumatera Barat (Dinkes, 2018). Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang juga mengalami penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap yang signifikan sebesar (17%) dari pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 dari (90%) cakupan imunisasi dasar pada tahun 2019 (Dinkeskab, 2021).

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaporkan cakupan program imunisasi dasar dari dua puluh puskesmas pada tahun 2020 belum mencapai target UCI (100%) dengan tiga cakupan terendah berada di Puskesmas Pasar Kuok (26%), Puskesmas Tapan (27%), dan Puskesmas Surantih (47%) (Dinkeskab, 2021). Secara geografis ketiga puskesmas tersebut berada di tingkat keramaian tinggi dan juga jalan raya perlintasan Provinsi Sumatera Barat – Provinsi Bengkulu, di mana dari penelitian mengemukakan adanya hubungan signifikan risiko penyebaran COVID-19 terhadap kondisi mobilisasi di kota (Ghiffari, 2020). Sehingga ketiga puskesmas tersebut sempat menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala lokal berdasarkan PERBUP No.100/227/GTC/IX/2020 tentang ketentuan karantina COVID-19 di tingkat kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Studi awal dilakukan di wilayah puskesmas Air Haji dimana merupakan jumlah populasi bayi terbesar kedua di Kabupaten Pesisir Selatan yang mengalami penurunan cakupan imunisasi dasar sangat signifikan pada tahun 2020 (Dinkeskab, 2021). Pada studi awal terhadap 20 Ibu bayi didapatkan lebih separuh (55%) tidak ada mengimunisasi bayinya selama terjadinya pandemi COVID-19.

Wawancara singkat yang dilakukan pada Ibu yang tidak mengimunisasikan bayi mereka pada masa pandemi COVID-19 mengemukakan menolak karena takut serta khawatir bayi mereka tertular COVID-19 dari petugas kesehatan posyandu dan puskesmas (83%), menolak karena adanya informasi efek samping dan tidak adanya manfaat dari imunisasi yang di berikan (11%), dan sisanya menolak karena memperoleh informasi terkait kehalalan vaksin yang diberikan. Dari wawancara singkat tersebut hal ini tentu perlu di perdalam karena belum ada data empiris terkait keberagaman persepsi dan faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat pada pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap pada masa pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tentang analisis pencapaian dan faktor determinan program imunisasi dasar lengkap pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yaitu bagaimana analisis pencapaian dan faktor determinan program imunisasi dasar lengkap pada masa *pandemi* COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini di bagi menjadi dua :

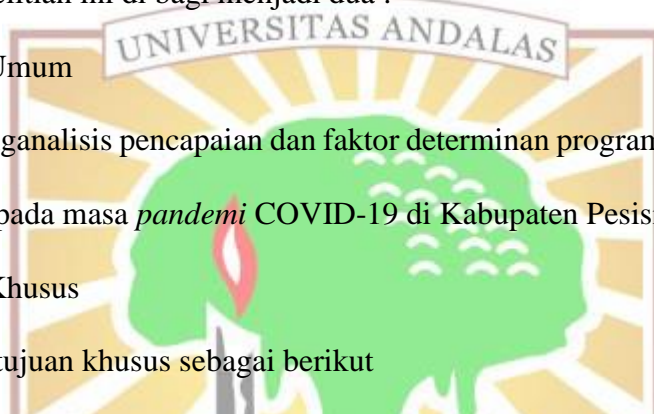
1. Tujuan Umum

Menganalisis pencapaian dan faktor determinan program imunisasi dasar lengkap pada masa *pandemi* COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus sebagai berikut

- a. Mengetahui gambaran karakteristik Ibu bayi di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan usia, pendidikan, sosial-ekonomi, dan agama.
- b. Mengetahui gambaran pengetahuan, sikap, persepsi, dan tindakan Ibu terhadap pelaksanaan program imunisasi dasar pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Mengetahui faktor determinan dari hubungan bermakna antara pengetahuan, sikap, dan persepsi (agama, keseriusan, isyarat bertindak, manfaat, dan hambatan) terhadap tindakan Ibu pada pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan



- d. Menganalisis secara mendalam pencapaian program pelayanan imunisasi dasar pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang di harapkan dengan penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan program, membuat kebijakan dan regulasi terkait pelaksanaan program imunisasi pada masa pandemi COVID-19 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan literasi yang mampu merubah pandangan tentang imunisasi, sehingga mampu merubah perilaku Ibu tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap

3. Bagi peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat khususnya bidang epidemiologi terkait program imunisasi dasar lengkap dan menjadi salah satu landasan gambaran untuk penelitian berikutnya, agar mampu dalam merancang suatu kebijakan terkait pelaksanaan imunisasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.